



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR TERHADAP PENANGGUHAN BEA MASUK MELALUI KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

OLGI RISNANDA
01576105194



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : OLGIS RISNANDA
 NIM : 01576105194
 PRODI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR TERHADAP PENANGGUHAN BEA MASUK MELALUI KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Pekanbaru, 09 Januari 2020

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

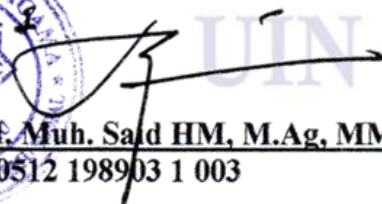

Virna Museliza, SE,MM
 NIK. 130 712 074


ANGGOTA

DEKAN

KETUA PRODI




Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : OLGIS RISNANDA
 NIM : 01576105194
 PRODI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR TERHADAP PENANGGUHAN BEA MASUK MELALUI KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 31 DESEMBER 2019

Pekanbaru, 09 Januari 2020


Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I


Khairil Henry, SE, M.Si. Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR TERHADAP PENANGGUHAN BEA MASUK MELALUI KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

Oleh :

OLGI RISNANDA
NIM: 01576105194

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang ingin mengajukan permohonan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Berikat untuk diimpor ataupun dipakai terhadap barang yang telah diolah atau digabungkan. Barang dari Kawasan Berikat dapat dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Beberapa industri ekspor dan impor mendapat fasilitas keringanan, seperti misalnya pembebasan bea masuk atau tarif 0%, keringanan bea masuk tarif menjadi 5%, dan penangguhan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Contoh untuk industri impor yang mendapatkan fasilitas adalah industri manufaktur telekomunikasi. Jadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan erat dengan pengelolaan Keuangan Negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan Cukai.

Kata Kunci : Barang impor, Penangguhan Bea Masuk, Kawasan Berikat



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur selalu penulis ucapkan dan juga kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Pengeluaran Barang Impor Terhadap Penangguhan Bea Masuk Melalui Kawasan Berikat Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Pekanbaru”**. Shalawat beriringkan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah S.A.W yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk dan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan. disamping itu penulis juga menerima bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

1. Rasa hormat yang sangat dalam Penulis ucapkan kepada Ayahanda Usman dan Ibunda Osnita yang telah memberikan inspirasi dan selalu memotivasi penulis dalam segala hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Kh. Ahmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu I, II, III Yang telah memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntu ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
4. Ibu Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, AC selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Iren Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
7. Ibuk Virna Museliza, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Kepada Staf Akademik dan Bagian Umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
10. Bapak Pemimpin dan beserta Staf Jajaran PNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
11. Sahabat-sahabat terbaik yaitu Eza Mardiantika, Dwi Prasetyo Utomo dan Keluarga besar DIII Administrasi Perpajakan dari seluruh angkatan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Serta pihak-pihak lainnya yang belum saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin, namun dalam penulisan ini juga disadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari tahap kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. Disamping itu penulis juga berharap agar Tugas Akhir ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Januari 2019
Penulis

Olgi Risnanda
01576105194

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.3.3. Metode Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
2.1. Sejarah Berdirinya KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	11
2.2. Visi dan Misi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	14
2.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	14
BAB. III TINJAUAN PRAKTEK DAN TEORI	
3.1. Tinjauan Teori	23
3.1.1. Pengertian Prosedur	23
3.1.2. Pengertian Impor	24
3.1.3. Pengertian Kawasan Berikat	27
3.1.4. Dasar Hukum	32
3.1.5. Dokumen-Dokumen Impor	33
3.1.6. Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan	34
3.1.7. Pengawasan dan Pelayanan	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2. Tinjauan Praktek	40
3.2.1. Proses pengeluaran barang impor dari tempat Penimbunan Berikat.....	40
3.2.2. Penangguhan Bea Masuk terhadap Barang Impor yang Masuk Melalui Kawasan Berikat.....	48
3.2.3. Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan di Kawasan Berikat.....	50
3.2.4. Syarat Penetapan Kawasan Berikat	54
3.2.5. Kendala-Kendala yang dihadapi KPPBC saat melakukan Permeriksaan.....	56
3.2.6. Tindakan-Tindakan yang dilakukan KPPBC Bila Terjadi Kecurangan atau Penyimpangan	57

BAB. IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

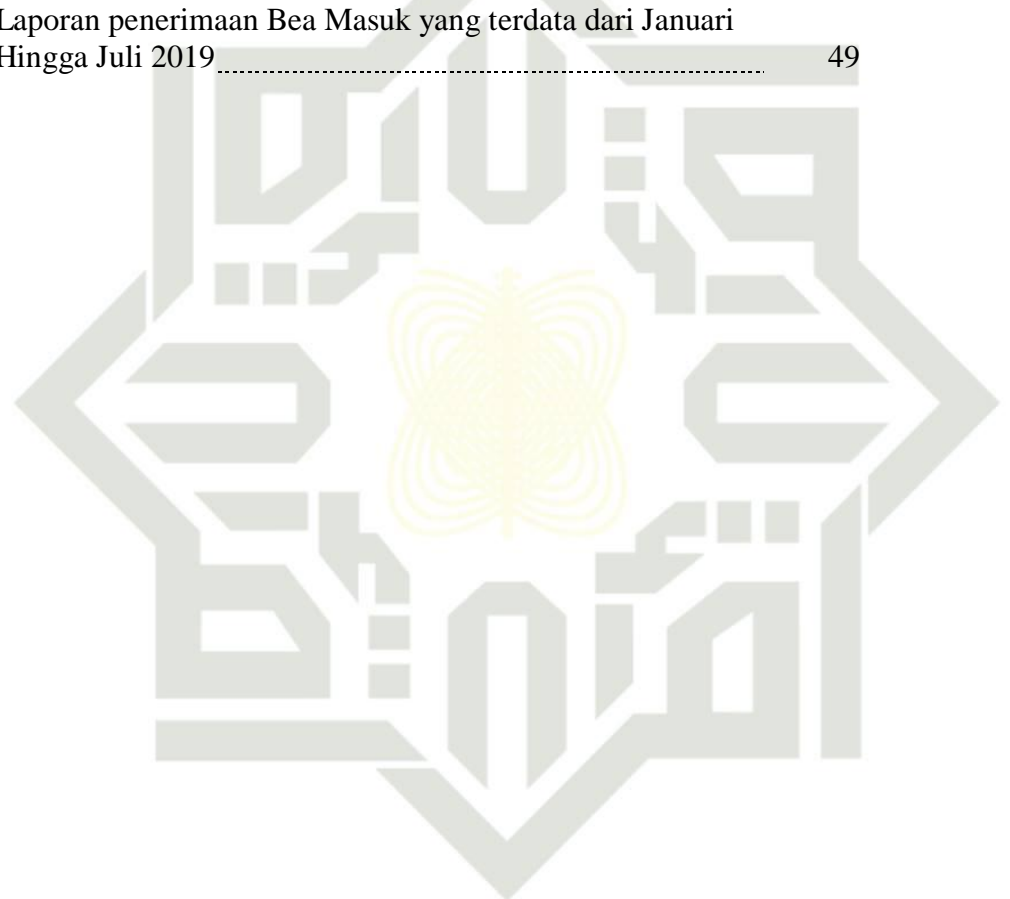
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan jumlah dokumen pemberitahuan Pengeluaran Impor Barang dari Tahun 2017-2018.....	5
Tabel 3.1	Pengertian dan perbedaan jenis Impor.....	25
Tabel 3.2	Penerimaan Dokumen PIB pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dari Tahun 2017-2019.....	42
Tabel 3.2	Laporan penerimaan Bea Masuk yang terdata dari Januari Hingga Juli 2019.....	49



UIN SUSKA RIAU

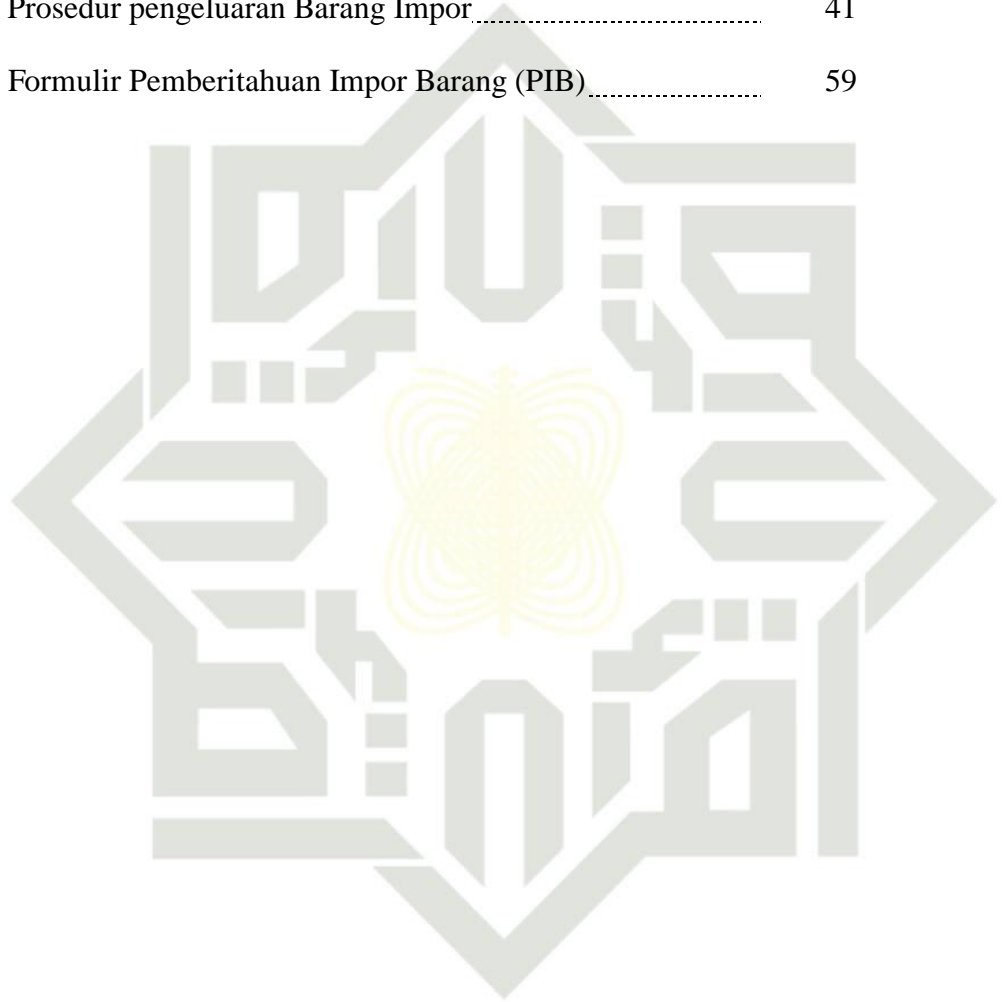


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur prosedur pengeluaran Barang Impor.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.....	22
Gambar 3.2	Prosedur pengeluaran Barang Impor.....	41
Gambar 3.2	Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	59



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, khususnya dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, ketergantungan terhadap perdagangan internasional dan lalulintas ekspor-impor barang semakin tinggi. Negara- negara maju maupun negara-negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar produk mereka maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka. Sehingga serbuan masuknya barang-barang impor merupakan suatu fenomena yang setiap saat selalu terjadi.

Selain itu, berbagai perubahan strategis yang ditandai dengan semakin meningkatnya intensitas perdagangan internasional serta ICT (*Information dan Communication technology*) membuat dunia usaha menurun institusi kepatuhan yang tanggap dan cepat merespon tuntutan dan kebutuhan mereka. Institusi dituntut mampu merespon fasilitator terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta dunia usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Untuk itu, beberapa industri ekspor dan impor mendapat fasilitas keringanan, seperti misalnya pembebasan bea masuk atau tarif 0%, keringanan bea masuk-tarif menjadi 5%, dan penangguhan pengenaan PPN (Pajak

Pertambahan Nilai). Contoh untuk industri impor yang mendapat fasilitas adalah industri manufaktur telekomunikasi.

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pebean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kawasan berikat melakukan penyelenggaraan pengusaha kawasan berikat. Penyelenggaraan kawasan berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusaha kawasan berikat. Pengusaha kawasan berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusaha di kawasan berikat. Pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggaraan di kawasan berikat yang selanjutnya diangkat PDKB yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan pengusaha kawasan berikat yang berada di dalam kawasan berikat milik penyelenggaraan kawasan berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.



Gambar 1.1
Alur Prosedur pengeluaran Barang impor

Dalam proses impor terdapat tahapan-tahapan atau prosedur impor yang harus dilalui. Hal itu dilakukan agar aliran barang dari luar negeri ke dalam negeri dapat terkoordinasi secara efektif dan efisien. Selain itu barang dari luar negeri dapat segera terlacak keberadaannya. Prosedur pengeluaran barang impor yang dilalui melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak importir, freight forwarder, PPJK, pihak pabean, eksportir dan pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Pelaksanaan impor akan berhasil jika masing-masing pihak (Importir dan Eksportir) dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah disepakati.

Dalam proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), Bea Cukai melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, proses pengeluaran barang setelah diperiksa dokumen-dokumen impor selanjutnya

akan ditetapkan penjalurannya, seperti barang impor yang terkena jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, jalur prioritas, dan jalur non-prioritas.

Pengeluaran barang impor dapat dibagi atas pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dilakukan dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, ditimbun di tempat penimbunan berikat, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut lanjut atau diekspor kembali. Pengeluaran barang impor dengan tujuan untuk dipakai terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari kawasan pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Importir/PPJK menyiapkan PIB berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang harus dibayar.

Direktorat Jenderal Bea dan cukai merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesia dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang kepabaeanan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru merupakan instansi yang berada yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mempunyai tugas untuk mengawasi dan menertibkan barang-barang yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Laporan jumlah dokumen Pemberitahuan Penerimaan Impor Barang pada Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jumlah Dokumen					
	BC 2.3	BC 2.6.2	BC 40	BC 30	BC 2.6.1	BC 2.5
2018	413	5899	405	329	6931	4
2019	678	9672	664	540	10192	8
Total	1091	15569	1069	869	17123	12

Sumber : Subseksi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru 2018-2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa setiap tahunnya jumlah pengeluaran barang melalui kawasan berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Pekanbaru semakin meningkat. Penerimaan dan pengeluaran juga sudah memenuhi target yang dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mempunyai permasalahan mengenai bagaimana prosedur pengeluaran barang impor melalui kawasan berikat terhadap penangguhan bea masuk pada kantor KPPBC TMP B Pekanbaru. Dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti prosedur pengeluaran barang impor terhadap bea masuk melalui kawasan berikat, mengingat lalu lintas impor yang meningkat di kota Pekanbaru. Sehingga menjadikan banyak barang dari luar negeri yang akan di impor kedalam negeri. Dan mencegah kecurangan ataupun penyeludupan terjadi yang dapat menyebabkan kerugian negara, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah pengetahuan mengenai **“Prosedur Pengeluaran Barang impor terhadap Penangguhan Bea Masuk melalui Kawasan Berikat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru”** .

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui maksud maupun tujuan dari objek penelitian, serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor terhadap penangguhan bea masuk melalui kawasan berikat pada Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan barang impor?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pengeluaran barang impor melalui kawasan berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan barang impor dan cara mengatasi kendala tersebut.
- c. Untuk mengetahui tindakan-tindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam menangani

penyimpangan-penyimpangan yang kadang terjadi dalam proses pemeriksaan barang impor.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi instansi

Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif untuk peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap pengeluaran barang impor terhadap penangguhan bea masuk melalui kawasan berikat pada KPPBC TMP B Pekanbaru.

b. Bagi penulis

Aspek pengembangan ilmu dalam hal perdagangan internasional khususnya dibidang impor barang, dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian ilmiah terkait masalah yang sama.

c. Bagi lembaga pendidikan

Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

1.3.3. Metode Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yaitu pada tanggal Maret – April 2019

c. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

1) Interview

Melakukan tanya jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2) Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3) Studi Pustaka

Metode yang menampilkan penelitian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

e. Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

f. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari tugas akhir ini, serta lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian prosedur, dasar hukum, pengertian impor, pengertian bea masuk, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan impor pada kawasan berikat, pengertian kawasan fasilitas kepabeanan dan perpajakan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Seiring dengan reformasi yang bergulir, bersamaan dengan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, baik industri dan perdagangan di tanah air, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya perbaikan mutu pelayanan secara serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan secara sistematis dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplemtasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

a. Sejarah Singkat

Pada tahun sekitar 1950-an KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area Pelabuhan Laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 area Pelabuhan Laut Pekanbaru/lapangannya diperluas. Maka pada tahun 1987 KPPBC Tipe A2 Pekanbaru menempati gedung baru di jalan Sudirman Ujung No. 2-4 sampai dengan sekarang, berikut ini adalah beberapa kali perubahan/teorganisasi belum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

1. Tahun 1987 s/d 1993 : dengan nama Kantor Inpeksi Bea dan Cukai tipe B1 Pekanbaru
2. Tahun 1994 s/d 1997 : dengan nama Kantor Inpeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
3. Tahun 1998 s/d 2002 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2002 s/d 2006 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pekanbaru
5. Tahun 2007 s/d 2009 : dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Pekanbaru
6. Tahun 2009 s/d 2011 : dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A2 Pekanbaru
7. Tahun 2011 s/d sekarang : dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
8. Berangkat dari tahun 1987 s/d 2006 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan Kantor wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan mulai 2007 s/d sekarang berada dibawah pengawasan Kantor wilayah Riau dan sumatera Barat.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pekanbaru berfungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabean dan cukai;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
9. Pengadministrasian kantor.

2.2. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

- a. Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru adalah menjadi Kantor yang Profesional dan Responsif di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Pekanbaru adalah:
 - 1) Kami memberikan pelayanan yang responsif kepada pengguna jasa untuk mendukung fasilitas perdagangan dan industri;
 - 2) Kami melakukan pengawasan yang efektif untuk melindungi masyarakat dari keluar masuk barang impor/ekspor ilegal dan beredarnya barang kena cukai ilegal;
 - 3) Kami optimalkan penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai secara profesional.

2.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Kepala kantor dan kepala seksi-seksi maupun subbagian yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki tugasnya masing-masing, Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkat jabatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, yaitu :

a. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Bertanggung jawab dan mengawasi kinerja para staff serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Kepala Subbagian Urusan Umum

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Subbagian Umum terdiri atas :

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

c. Kepala Bagian Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

1. Subseksi intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
 2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
 3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penata usahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- d. Kepala Seksi Perbendaharaan
- Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Seksi Perbendaharaan terdiri atas :

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penata usahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

e. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang dan cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
3. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean;
6. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
8. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
9. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
10. Pelaksaaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
11. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;

12. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
13. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
14. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
15. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
16. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
17. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas :

1. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan perundang-undangan.
2. Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas :

1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai.

h. Seksi Pengelolaan Data dan Adminitrasi Dokumen

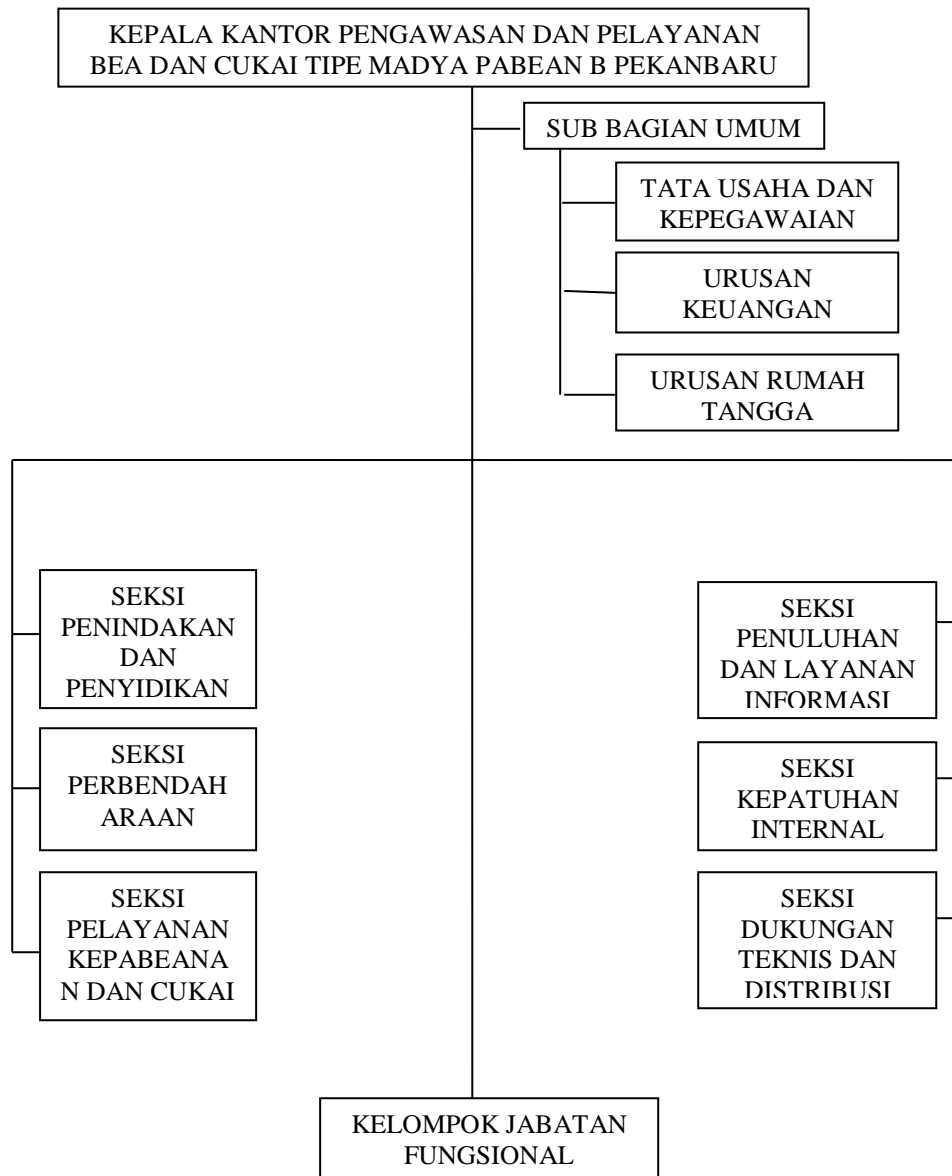
Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, penukaran data elektronik, pengolahan data, kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
2. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
3. Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
4. Pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
5. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi :

1. Pelabuhan udara Sultan Syarif Kasim II;
2. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru;
3. Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo);
4. Pelabutan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA).



Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu mengenai Prosedur Pengeluaran Barang Impor di Kawasan Berikat Terhadap Penangguhan Bea Masuk, maka bab terakhir ini penulis akan menggunakan beberapa kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu :

1. Prosedur pengeluaran barang impor terhadap penangguhan bea masuk melalui kawasan berikat yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dilakukan secara detail dan sudah sesuai dengan semua prosedur yang telah terdaftar tanpa mengurangi maupun menambah peraturan tata cara pemeriksaan yang telah ada, sehingga proses ini dapat terkendali dan berjalan lancar.
2. Tata cara pemeriksaan barang impor dilakukan sangatlah detail sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tingkat penyimpangan dapat ditekan seminim mungkin. Apabila terjadi penyimpangan yang terdeteksi dalam proses pemeriksaan maka proses pemeriksaan akan diulang kembali ke proses pemeriksaan yang lebih mendetail hingga nomor pemberitahuan impor dikeluarkan oleh pihak bea dan cukai sebagai tanda bawa barang tersebut sudah dapat dikirim.
3. Bila terjadi penyimpangan maka pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru menjatuhkan sanksi kepada importir sesuai dengan peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor

P-40/BC/2008, yaitu tentang denda administrasi bila barang yang diperiksa tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan.

4.2. Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang terkait dengan pemeriksaan barang ekspor, sebaiknya meningkatkan ketegasan pada eksportir yang melakukan penyimpangan, serta ketelitian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perlu ditekankan lagi.
2. Dalam hal sanksi yang telah dipergunakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan yang tertulis didalam peraturan Dirjen Bea dan Cukai, namun menurut penulis sanksi administrasi tidaklah mencukupi untuk membuat para importir nakal jera atas kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan sehingga pihak bea dan cukai perlu membuat peraturan yang lebih dapat membuat jera para eksportir dan importir nakal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat An-Nisa ayat 29.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bariwan, Z. 2000. *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)*. Yogyakarta : YKPN
- Richard F. Neuschel. *Pengertian Sistem dan Prosedur*. Diakses pada 5 juli 2019 dari <http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/pengertian-sistem-dan-prosedur.html>
- Jerry FitzGerald, dkk. *Fundamentals of Sistem Analysis*. 1981. Willey. Diakses pada 5 juli 2019 dari http://repository.amikom.ac.id/files/PUBLIKASI_07.12_2260_pdf
- Amir M.S. (2003). *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Cetekana Kedelapan. Penerbit *Lembaga Manajemen PPM*, Jakarta Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/1996 jo. P-43/BC/1997 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 jo. No. 43 Tahun 1997 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- PMK Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- PMK Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No.146/PMK.04/2014 jo PMK No. 86/PMK.04/2016 Tentang Pemungutan Bea Masuk.
- PMK Nomor 131/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- PMK Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Impor yang Dikenakan Bea Masuk dan Tarif Bea Masuk.
- Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang *Impor*.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 *Pasal 53* Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- www.beacukai.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

OLGI RISNANDA, lahir di Tanjung Balik pada tanggal 23 Agustus 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Usman dan ibunda Osnita. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 01 Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 08 Payakumbuh, lulus

pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 04 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2015. Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret 2019 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dengan judul **Prosedur Pengeluaran Barang Impor Terhadap Penangguhan Bea Masuk Melalui Kawasan Berikat Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 31 Desember 2019 dengan IPK terakhir 3,11 dengan prediket memuaskan dan berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).